BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kinerja perusahaan yang baik dimata para penanam modal menjadi pertimbangan penting bagi perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan industri manufaktur, karena kinerja yang baik sehingga para penanam modal akan lebih antusias di dalam memberikan dukungan sepenuhnya kepada perusahaan tersebut. Dengan meningkatnya dukungan penanam modal lebih-lebih berupa dukungan financial kepada perusahaan tersebut tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, namun juga dapat mempercepat laju pertumbuhan sektor manufaktur sehingga perusahaan dapat bersaing lebih kompetitif baik dalam pasar domestik maupun pasar internasional.

Begitu pentingnya kinerja perusahaan bagi perusahaan manufaktur di dalam mencari keuntungan dan mengembangkan perusahaanya, maka sebuah perusahaan manufaktur harus mampu menjaga kinerjanya tentunya dengan memperhatikan factor apa saja yang mampu mempengaruhi kinerja perusahaan. Dengan tindakan yang tepat terhadap sebuah kebijakan serta sumber daya yang mendukung juga diharapkan mampu menjaga kinerja perusahaan menuju ke hal yang lebih baik.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan sebuah perusahaan dalam meningkatkan kinerjanya yaitu dengan penerapan *Good Corporate Governance*.Perbaikan Corporate Governance merupakan suatu hal yang harus dilakukan, seperti melalui pembentukan komite audit, peningkatan transparansi informasi, keberadaan komisaris independen, meningkatkan

UNMAS DENPASAR

hubungan dengan investor, dan pemberian remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan, dan sebagainya untuk mengatasi masalah yang ada dalam pengelolaan perusahaan (Kusmayadi, 2015 : 12).

Good corporate governance (GCG) menjadi isu penting pada saat terjadinya kasus manipulasi dan kebangkruntan besar-besaran yang terjadi di perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat (AS). Kasus ini terjadi akibat buruknya sistem dari tata kelola perusahaan. Menurut Tuanakotta (2007:235) mengemukakan bahwa "kasus *good corporate governance* menimpa perusahaan-perusahaan raksasa yang terjadi pada awal tahun 2000-an seperti Enron, Tyco, Adelphia, Global Crossing, Williams Companies, WorldCom, Dynegy, JPMorgan Chase, Citicorp, AOL, Time Warner, dan Lucent Technologies". Untuk mengatasi krisis yang terjadi di AS, dikeluarkanlah undang-undang yang terkenal dengan nama *Sarbanes-Oxley Act of 2002*. Undang-undang *ini* berisi penataan kembali Akuntansi Perusahaan Publik, tata kelola perusahaan, dan perlindungan terhadap investor. Kemudian lebih lanjut, SOX 2002 dipakai sebagai acuan oleh negara-negara lain. Tidak hanya di Amerika Serikat, di Indonesia juga timbul krisis ekonomi pada perusahaan besar, seperti beberapa kasus yang melibatkan persoalan laporan keuangan seperti PT. Lippo dan PT. Kimia Farma pada tahun 2002 yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi (Boediono, 2005). Dengan adanya berbagai skandal akuntansi yang terjadi pada perusahaan-perusahaan mengakibatkan turunnya kepercayaan publik terutama investor terhadap pelaporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan sehingga membuat kinerja perusahaan menurun.

UNMAS DENPASAR

Untuk mengatasi permasalahan terkait GCG di Indonesia, bermula dari usulan penyempurnaan peraturan pencatatan pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) yang mengatur mengenai peraturan bagi emiten yang tercatat di BEI yang mewajibkan untuk mengangkat komisaris independent dan membentuk komite audit pada tahun 1998, Corporate Governance (CG) mulai di kenalkan pada seluruh perusahaan public di Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian mendirikan satu lembaga khusus yang bernama Komite Nasional mengenai Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) melalui Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Nomor: KEP-31/M.EKUIN/06/2000.Tugas pokok KNKCG merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional mengenai GCG, serta memprakarsai dan memantau perbaikan di bidang corporate governance di Indonesia. Melalui KNKCG muncul pertama kali pedoman Umum GCG di tahun 2001, pedoman CG bidang Perbankan tahun 2004 dan Pedoman Komisaris Independen dan Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif.

UNMAS DENPASAR

Pada tahun 2004 Pemerintah Indonesia memperluas tugas KNKCG melalui surat keputusan Menteri Koordinator Perekonomian RI No. KEP-49/M.EKON/II/TAHUN 2004 tentang pemebentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang memperluas cakupan tugas sosialisasi Governance bukan hanya di sector korporasi tapi juga di sector pelayanan public.KNKG pada tahun 2006 menyempurnakan pedoman CG yang telah di terbitkan pada tahun 2001 agar sesuai dengan perkembangan. Pada Pedoman GCG tahun 2001 hal-hal yang dikedepankan adalah mengenai pengungkapan

dan transparansi, sedangkan hal-hal yang disempurnakan pada Pedoman Umum GCG tahun 2006

Kusmayadi, dkk (2015 : 13) menyatakan bahwa Good Corporate Governance akan mampu meningkatkan keyakinan penanam modal / investor terhadap perusahaan tersebut, mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen, mengurangi biaya modal (cost of capital), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan, meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang, menciptakan dukungan para stakeholder (para pihak yang berkepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Stakeholder yang dimaksud yaitu pemegang saham, dewan komisaris dan direksi, pihak komite audit dan pihak-pihak manajerial yang lain.

Namun *Good Corporate Governance*, juga tidak lepas dari kelemahan, yaitu, adanya factor sumber daya manusia yang menyalahgunakan setiap kebijakan yang ada untuk kepentingan di luar untuk peningkatan kinerja perusahaan, serta adanya tindakan melanggar hukum yang mampu memberikan dampak negatif terhadap kepercayaan penanam modal kepada

UNMAS DENPASAR

perusahaan tersebut. Selain penerapan *Good Corporate Governance,* perusahaan perlu mempertimbangkan karakteristik lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik yang perlu diperhatikan. Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang dilihat dari besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Perusahaan yang lebih besar dapat memberikan informasi yang lebih baik bagi investor dalam kepentingan investasi, karena perusahaan yang besar akan mendapatkan perhatian lebih oleh masyarakat sehingga dalam melakukan pelaporan perusahaan akan lebih hati-hati dalam melaporkan kinerja perusahaan yang tercermin dari laporan keuangan. Namun dibalik itu semua, semakin besar perusahaan tentunya makin besar juga tantangannya, serta perkembangannya pun akan disesuaikan persentase yang diperoleh bukan dari jumlah yang ia peroleh, artinya semakin besar perusahaan tentunya memerlukan banyak dukungan dan banyak tuntutan yang harus dipenuhi seperti tuntutan kinerja yang lebih baik dari target yang ditentukan untuk menopang anggaran keuangannya. Sedangkan perusahaan kecil tentunya memiliki anggaran terutama anggaran pengeluaran yang lebih sedikit sehingga lebih memiliki sedikit tuntutan. Belum lagi jika dikaji dari banyaknya pihak-pihak yang bernaung di dalamnya, semakin besar perusahaan semakin banyak pihak yang campur tangan di dalamnya sehingga mempunyai tantangan yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja.

Berdasarkan latar belakang yang masih menunjukkan ketidak konsitenan pengaruh *Good Corporate Governance,* dan ukuran peruusahaan terhadap kinerja perusahaan, maka peneliti akan melakukan penelitian tentang

UNMAS DENPASAR

"Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 -2018".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdapat di bursa efek indonesia ?
2. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdapat di bursa efek indonesia ?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia ?

UNMAS DENPASAR

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh komisaris independen terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdapat di bursa efek indonesia
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empirispengaruhdewan direksi terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdapat di bursa efek indonesia

3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empirispengaruhkomite audit terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, peneliti selanjutnya, perusahaan, dan pengguna laporan keuangan**.**

1. Teoritis

   Diharapkan menjadi sarana memperdalam pengetahuan peneliti tentang pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan dan juga dapat bermanfaat untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan memberikan tambahan bagi perusahaan untuk lebih memerhatikan mengenai pengaruh *good corporate governance*, sehingga perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan menjadi gambaran bagi para pengguna laporan keuangan terutama investor mengenai pengaruh *good corporatae governance*, sehingga dapat menjadi pedoman dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi

UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency teory*)

Berdasarkan teori keagenan, perusahaan adalah suatu legal fiction yang berperan penting dalam proses mengarahkan tujuan-tujuan individu yang berbeda ke keseimbangan dalam kerangka hubungan kontraktual (Jensen dan Meckling, 1976). Teori keagenan didasarkan pada konsep pemisahan antara pemilik dan manajemen perusahaan. Baik pemilik ataupun manajemen berusaha memaksimalkan kepentingannya sendiri. Dipandangdarisudutmanajemen, sebagai orang suruhan (agent) dari pemilik dana (principal), tidak selalu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik dana. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya masalah keagenan (agency problem).

UNMAS DENPASAR

Masalah keagenan ini akan menimbulkan biaya, yang disebut sebagai biaya keagenan (agency costs). Biaya keagenan dapat dijelaskan sebagai jumlah dari biaya monitoring yang dilakukan principal, biaya ikatan yang dikeluarkan agent, dan residual loss. Teori keagenan memandang esensi dari perusahaan adalah hubungan kontrak dengan semua pihak: karyawan, kreditur, pelanggan dan lain-lain.

Menurut Sugiarto (2009:19) mengemukakan bahwa Teori keagenan (*Agency theory*) merupakan suatu hubungan yang berdasarkan pada kontrak yang terjadi antar-anggota dalam perusahaan, yakni antara

principal (pemilik) dan *agent* (agen) sebagai pelaku utama. Hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih *principal* memperkejakan agen untuk memberikan jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut.

Dengan demikian, seorang *agent* wajib mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan oleh *principal* kepadanya. Dalam perusahaan, hubungan antara *principal* dan *agent* diwujudkan dalam hubungan antara pemegang saham dan manajer. Pemegang saham berperan sebagai *principal* sementara manajer berperan sebagai *agent*.

Perusahaan merupakan serangkaian kontrak yang mencakup cara dimana input diproses untuk menghasilkan output dan cara dimana hasil dari output dibagi diantara input. Dengan melihat pemahaman tentang teori keagaenan maka teori ini sesuai dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh *Good Corporate Governace* (GCG) dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan, dimana dalam penelitian ini bertujuan melihat apakah terdapat pengaruh sistem dan struktur yang terkait pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perusahaan khususnya manufaktur yang memiliki input yang baik, baik kedudukannya sebagai principal maupun sebagai agent apakah menentukan output yang akan dicapai yaitu kinerja perusahaan. Dengan kinerja yang perusahaan yang baik tentunya akan menguntungkan kembali bagi para pihak di atas baik kedudukannya sebagai principal maupun sebagai agen.

UNMAS DENPASAR

2.1.2 Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atasperusahaan selama periode waktu tertentu, yang merupakan hasil atau prestasi yangdipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumberdaya-sumber daya yang dimiliki. Menurut Nur'aeni (2010:28) mengemukakan bahwa "kinerja Perusahaan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yangdapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkanlaba". Menurut Brigham dan Houston (2006:65) mengemukakan bahwa "pengukuran kinerja perusahaan dapat diukur dari laporan keuangan yangdikeluarkan secara periodik. Laporan keuangan berupa neraca,rugi-laba,arus kas, dan perubahan modal yang secara bersama-sama memberikansuatu gambaran tentang posisi keuangan perusahaan". Informasiyangterkandung dalam laporan keuangan digunakan investor untuk memperoleh perkiraan tentang laba dan dividen dimasa mendatang dan resikoatas penilaian tersebut. Dengan demikian pengukuran kinerja perusahaan dari laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan kekayaan pemegang saham (investor).

UNMAS DENPASAR

Menurut Ang (2008:24) mengemukakan bahwa pengukuran kinerja keuangan berdasarkan analisis rasio keuangan dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu:

1. Rasio Likuiditas

   Rasio ini menyatakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek. Rasio likuiditas terdiri dari current ratio, quick ratio, dan net working capital.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri dari debt ratio,debt to equity ratio, long term debt to equity ratio, long term debt to capitalization ratio, times interest earned, cash flow interest coverage, cash flow interest coverage, cash flow to net income,dancash return on sales.

3. Rasio Aktivitas

   Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan harta yang dimilikinya. Rasio Aktivitas terdiri dari total asset turnover, fixed asset turnover, account receivable turnover, inventory turnover, average collection period, dan day's sales ininventory.

4. Rasio Rentabilitas/Profitabilitas

   Rasio ini menunjukkan kemampuan dari perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio rentabilitas terdiri dari gross profit margin, net profit margin, return on assets, return on equity, dan operating ratio.

5. Rasio Pasar

   Rasio ini menunjukkan informasi penting perusahaan dan diungkapkan dalam basis per saham. Rasio pasar terdiri dari dividend yield, dividend per share, dividend payout ratio, price earning ratio,earning per share, book value per share, dan price to book value.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari seberapa besar efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam

UNMAS DENPASAR

memanfaatkan ekuitas (*shareholder's equity*) yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan bersih. Para investor pasti akan lebih tertarik mengivestasikan dananya pada perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya labanya sehingga investor tidak perlu takut atas tidak kembalinya dana atau *return* yang diharapkan dapat dihasilkan di masa depan. Ini dapat dibuktikan dengan melihat ROE perusahaan yang nantinya akan menjadi pedoman bagi investor untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik atau tidak. Semakin tinggi rasio ROE maka semakin tinggi perusahaan dalam mengembalikan dana yang diinvetasikan oleh investor dalam perusahaan dan semakin baik kinerja suatu perusahaan. Dengan demikian, kinerja perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan salah satu rasio profitabilitas, yaitu *return on assets* (ROE).

2.1.3 *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Sutedi (2011:1) *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang saham, dewan komisaris dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham lainnya. Berlandaskan peraturan perundang - undangan dan nilai-nilai etika. Sedangkan menurut Widjaja Tunggal (2013:149) *corporate governance*adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti kreditor, supplier,

UNMAS DENPASAR

asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas. Menurut Agoes (2009:104) mengemukakan bahwa terdapat prinsip-prinsip*good corporate governance*, yaitu:

1. Keterbukaan (*Transparancy*)

   Keterbukaan kepada *stakeholders* dalam melakukan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan dengan lima karakteristik, yaitu komprehensif, relevan, *friendly*, *reliable*, dan *comparable*. Informasi mengenai laporan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan harus diungkapkan secara tepat dan akurat agar pemegang saham dan pihak lainnya dapat mengetahui keadaan perusahaan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

   Kejelasan fungsi, struktur, sistem pengendalian, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan dan keseimbangan kekuasaan antara *stakeholders* terlaksana secara efektif. Para anggota eksekutif seperti komisaris, direksi, dan jajarannya wajib memiliki integritas untuk menjalankan usaha sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility***)**

   Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip ini menuntut agar seluruh jajaran perusahaan untuk melakukan tugasnya dengan bertanggung jawab dan mematuhi hukum yang ditetapkan.

UNMAS DENPASAR

4. Kemandirian (*independency*)

   Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Keadilan (*fairness*)

   Perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturanperundangan yang berlaku. Setiap keputusan yang diambil senantiasa memperhatikan kepentingan dan memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas. Melindungi semua pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas dari rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan peratuaran yang berlaku

Menurut Agoes (2009:106) mengemukakan bahwa ada beberapa manfaat dari *good corporate governance*, antara lain :

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaanyang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masingmasing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggotaDireksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan

UNMAS DENPASAR

tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturanperundang-undangan.

4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitarperusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengantetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Berdasarkan pengertian GCG di atas, dapat dijelaskan bahwa GCG merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham lainnya. Dalam hal ini yang termasuk GCG merupakan bagian yang memiliki andil di dalam menentukan keberhasilan perusahaan baik pengurus yang secara langsung berperan di dalamnya maupun pihak lain yang berada di luar pengurus yang tentunya memiliki peran pentung dalam perusahaan seperti halnya komisaris independen (KIN), dewan direksi (DD), dan Komite Audit (KA). Berikut dijelaskan bagian-bagian dari GCG tersebut di atas.

UNMAS DENPASAR

2.1.4. Komisaris Independen

Menurut Komite Nasional Kebikajan *Governance* (2006:20) "komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata mata demi kepentingan perusahaan".

Menurut Agoes (2010:110) mengemukakan bahwa kriteria komisaris independepen antara lain:

1. Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen.
2. Komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tisak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan.
3. Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu.
4. Komisaris independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau peusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
5. Komisaris independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau

UNMAS DENPASAR

perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.

6. Komisaris independen tidak memiliki kontrektual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut.
7. Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.

2.1.5 Dewan Direksi

Menurut Walace dan Zinkin (2005:114). Direksi merupakan seseorang yang semestinya memutuskan atau biasanya memberi keputusan, bersama-sama dengan anggota dewan direksi lainnya dalam menentukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Dewan Direksi bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh dewan komisaris, pemeliharaan suatu struktur organisasi, dan memastikan bahwa pembagian wewenang berjalan secara efektif. Fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dewan direksi memiliki tugas antara lain:

1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan,

UNMAS DENPASAR

2. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer),
3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan,
4. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

2.1.6 Komite Audit

WidjajaTunggal (2008:136), menjelaskan definisi Komite Audit sebagai berikut: Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang di bentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Menurut Surya dan Ivan (2006:145) Komite Audit pada umumnya mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*) Komite Audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.
2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) Komite Audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan

UNMAS DENPASAR

kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*) Komite Audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk didalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

2.1.7 Ukuran Perusahaan

Menurut Setiawan (2009:4) mengemukakan bahwa "dilihat dari sisi kemampuan memperoleh dana untuk ekspansi bisnis, perusahaan besar mempunyai akses yang besarke sumber-sumber dana baik ke pasar modal maupun perbankan, untukmembiayai investasinya dalam rangka meningkatkan labanya".Perusahaan besar cenderung mendapat perhatian lebih dari masyarakat luas. Dengan demikian, biasanya perusahaan besar memiliki kecenderungan untukselalu menjaga stabilitas dan kondisi perusahaan. Untuk menjaga stabilitas dankondisi ini, perusahaan tentu saja akan berusaha mempertahankan dan terusmeningkatkan kinerjanya. Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan dan sebaliknya. Perusahaan yang mempunyai ukuran yang lebih besar akan cenderung mendapat perhatian lebih dari investor.

UNMAS DENPASAR

2.2 Penelitian Sebelumnya

1. Aprianingsih (2016) dengan judul ”Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014”. Dengan Variabel Independen: Dewan komisaris independen, Dewan direksi, Komite audit, Ukuran perusahaan. Sedangkan Variabel Dependen yaitu Kinerja keuangan ROA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :
    a. Dewan direksi, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
    b. Dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
2. Cintia Yuniarti (2014) dengan judul penelitian ”Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan dan nilai perusahaan pada perusahaan *High Profile* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013. Variabel Independen yaituProporsi dewan komisaris, sedangkan variabel independen yaitu : ukuran dewan komisaris, Ukuran komite audit, Kepemilikan, manajerial, Kepemilikan institusional, Kepemilikan terkonsentrasi, Kepemilikan publik, Kepemilikan asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
    a. kepemilikan publik, dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap kineja perusahaan dan nilai perusahaan.
    b. Ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan nilai perusahaan.

UNMAS DENPASAR

3. Rifa Yuliani (2018) dengan judul penelitian ”Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Rasio Leverage terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016”. Variabel Independennya yaitu Komisaris Independen, Komite Audit dan Rasio Leverage. Sedangkan Variabel Dependennya yaitu Kinerja Perusahaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa :Komisaris Independen, Komite Audit dan Rasio Leverage secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Semakin meningkat ketiga variabel tersebut, maka Kinerja Keuangan akan semakin meningkat, begitu sebaliknya.
4. Puniyasa dan Triaryati (2015) dengan judul penelitian ”Pengaruh *Good Corporate Governance,* Struktur Kepemilikan dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Yang Masuk Dalam Indeks CGPI”. Variabel Independen yaitu *Good Corporate Governance,* Struktur Kepemilikan dan Modal Intelektual sedangkan Variabel Dependennya yaitu Kinerja Keuangan Perusahaan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa :
    a. Hasil analisis menunjukkan *good corporate governance* dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.
    b. Kepemilikan manajerial dan modal intelektual, berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.
5. Waluya Ningsih, dkk. (2019) dengan judul penelitian ”Pengaruh Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan

UNMAS DENPASAR

Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan". Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan.

6. Destriyansah (2018) dengan penelitian berjudul "Pengaruh *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2017)". Hasil penelitian menunjukkan dewan direksi, dewan komisaris, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. *Good corporate governance*, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kineja perusahaan secara model.
7. Henny Ritha (2016), dengan judul penelitian "Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Ukuran (*Size*) Perbankan Terhadap Kinerja Perbankan 2009-2014". Dalam penelitian ini variabel yang tidak dibahas yaitu variabel *Good corporate governance.*Hasil penelitian membuktikan struktur kepemilikan manajerial dan ukuran perbankan berpengaruhsignifikan terhadap kinerja perbankan, sedangkan struktur kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan dan memberikan kontribusi sebesar 63,07 persen terhadap kinerja perbankan di Bursa Efek Indonesia 2009-2014, sedangkan sisanya 36,93 persen dipengaruhi oleh variabel lain.

UNMAS DENPASAR

8. Rastiana Dewi dan Indra Tenaya (2017), dengan judul penelitian "Pengaruh Penerapan *Gcg* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Di BEI Periode 2013-2016". Hasil penelitian ini menunjukkan Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. Dewan Direksi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perbankan.
9. Riniati (2015) dengan judul penelitian "Pengaruh Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan (Perusahaan yang Terdaftar di BEI 2011-2013)". Dari hasil analisis menunjukkan bahwa:
   (1) Terdapat pengaruh positifKomisaris Independen terhadap Kinerja Perusahaan makanan dan minuman .
   (2) Terdapat pengaruh positif Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan makanan dan minuman.
10. Rahmawati (2019) dengan judul penelitian "Pengaruh *Good Corporate Governance,* Struktur Kepemilikan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2017". Hasil uji t menunjukkan bahwa dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan dewan komisaris, dewan komisaris

UNMAS DENPASAR

independen, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Dari landasan teori dan penelitian terdahulu di atas dapat dijelaskan bahwasannya GCG dan Ukuran perusahaan tidak selalu dan tidak seara keseluruhan mempengaruhi Kinerja Perusahaan. Namun Kusmayadi, dkk (2015 : 12) menyatakan bahwasannya para pakar berpendapat prinsip-prinsip Corporate Governance diperlukan untuk mengatasi masalah yang ada dalam pengelolaan perusahaan. Banyak pihak seperti pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi berpendapat bahwa perbaikan Corporate Governance merupakan suatu hal yang harus dilakukan, seperti melalui pembentukan komite audit, peningkatan transparansi informasi, keberadaan komisaris independen, meningkatkan hubungan dengan investor, dan pemberian remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan, dan sebagainya. Artinya Kusmayadi, dkk mendukung sepenuhnya bahwa pendapat para pakar keseluruhan dari GCG secara keseluruhan sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. Sedangkan ukuran perusahaan sangat dipengaruhi oleh modal usaha serta nantinya pendukung dari GCG yang ada.Makin besar modal dan keberadaan GCG tentunya ukuran perusahaan tersebut tergolong perusahaan besar. Namun besanya ukuran perusahaan belum tentu akan membuat kinerja perusahaan akan lebih baik juga karena tergantung sumber daya manusianya sendiri yaitu bagaimana kuantitas dan kualitas kinerja yang menggerakan dan menunjang perusahaan tersebut. Meskipun apabila kita lihat dari penelitian sebelumnya lebih dominan menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi kinerja perusahaan.

UNMAS DENPASAR

Merupakan sebuah hal yang menarik untuk di bahas lebih lanjut bagaimanakah pengaruh masing-masing komponen GCG dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Untuk itulah disusun sebuah penelitian yang mengangkat judul **Pengaruh Good Corporate Governancedan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 -2018.**

UNMAS DENPASAR